

Ketahanan Ekologi Sosial dan Sistem Komunikasi Pembangunan Desa Wisata

Candra Yudha Satriya, Agus Triyono, Heni Indrayani

Universitas Dian Nuswantoro
Jl. Imam Bonjol No. 207, Semarang 50131
Email: candra.yudha.satriya@dsn.dinus.ac.id

DOI: 10.24002/jik.v22i1.9885

Submitted: September 2024

Reviewed: January 2025

Accepted: June 2025

Abstract: *This study examines the socio-ecological crisis in Wanurejo Village following its transformation into a tourism destination. From a constructivist perspective and using Luhmann's social system theory, it explores the causes of the crisis and the formation of a Community-Based Tourism (CBT) communication system. Findings reveal that environmental degradation stems from farmers' vulnerability and tourism complexity. Effective CBT development requires inclusive participation, fair income distribution, and alignment with the Borobudur image. The study concludes that balancing tourism growth with environmental and social justice is essential, and an inclusive communication system can enhance community involvement and reduce the adverse impacts of tourism.*

Keywords: *community-based tourism, development communication, rural tourism, social system*

Abstrak: *Penelitian ini mengkaji krisis ekologi sosial di Desa Wanurejo setelah transformasi menjadi destinasi pariwisata. Perspektif konstruktivis dan teori sistem sosial Luhmann digunakan dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi penyebab krisis dan pembentukan sistem komunikasi Community-Based Tourism (CBT). Temuan menunjukkan bahwa degradasi lingkungan berasal dari kerentanan petani dan kompleksitas pariwisata. Pengembangan CBT yang efektif membutuhkan partisipasi yang inklusif, distribusi pendapatan yang adil, dan keselarasan dengan citra Borobudur. Studi ini menyimpulkan bahwa menyeimbangkan pertumbuhan pariwisata dengan keadilan lingkungan dan sosial sangat penting, dan sistem komunikasi yang inklusif dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mengurangi dampak buruk pariwisata.*

Kata Kunci: *desa wisata, komunikasi pembangunan, pariwisata berbasis masyarakat, sistem sosial*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah lingkungan di mana masyarakatnya memiliki hubungan yang hangat dan kekeluargaan, serta merupakan daerah yang

bergantung pada pertanian (Djarmiko, Syarifuddin, Raharja, & Fitriani 2021, h. 3). Sebagai produk dari pemukiman masyarakat agraris, desa merupakan ekosistem kompleks yang di dalamnya terdapat subsistem alam, ekonomi, dan sosial yang terintegrasi (Kunjuraman, 2020, h. 2). Manusia berinteraksi dan mendaur ulang aliran material dan energi dengan alam melalui produksi dan gaya hidup, sebuah proses yang beroperasi

dalam dimensi ekologi sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan kearifan manusia dalam mengelola lingkungannya. Hal ini sesuai dengan falsafah yang menjadi salah satu pedoman hidup masyarakat Jawa *hamemayu hayuning bawana* yang menunjukkan bahwa manusia dalam berinteraksi dengan alam dan manusia lainnya haruslah bijaksana, tidak merusak, dan menjaga apa pun yang telah disediakan alam.

Konsep *Community-Based Tourism* (CBT) yang diimplementasikan ke dalam pengembangan pariwisata perdesaan berkelanjutan memiliki potensi kuat untuk memberi manfaat dan memberdayakan masyarakat desa, terutama melalui peningkatan kapasitas, kemitraan, dan kolaborasi (Dolezal & Novelli, 2020, h. 2). CBT memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan dan pelestarian aset budaya dan alam, serta sebagai ruang kolaborasi dan kemitraan. Menurut Sunuantari (2017, h. 155), implementasi CBT yang efektif dapat mendukung pembangunan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja, mendorong partisipasi yang adil bagi masyarakat lokal, meminimalkan dampak pariwisata terhadap lingkungan, melestarikan warisan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan. Inisiatif pengembangan CBT tidak akan berhasil tanpa kerja sama, dukungan, niat baik, dan partisipasi masyarakat lokal. CBT memiliki potensi yang kuat untuk memberi manfaat dan memberdayakan masyarakat, terutama melalui peningkatan kapasitas serta kemitraan dan kolaborasi, terlepas dari kompleksitas dan ambiguitas dinamika

kekuasaan yang tercipta antara pemangku kepentingan swasta, pemerintah, dan masyarakat (Stone & Stone, 2020, h. 182).

Manusia kini semakin bergantung pada kemajuan teknologi dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ketergantungan ini berkembang seiring dengan pesatnya perubahan sosial yang berorientasi pada pasar, di mana faktor ekonomi menjadi yang paling dominan (Musavengane & Kloppersb, 2020, h. 2). Selain itu, pengembangan pariwisata komersial telah digunakan sebagai cara untuk mengentaskan kemiskinan di banyak desa (Manyara & Jones, 2007, h. 628), terutama di negara-negara berkembang (Ghaderi, Hall, & Ryan, 2022, h. 3). Daerah perdesaan sangat bergantung pada input alami dan proses ekosistem untuk memenuhi fungsi produksi lahan (Satarat, 2010, h. 13) sehingga sejumlah besar modal dari berbagai lembaga di berbagai tingkat pemerintahan diinvestasikan untuk mengonsumsi sumber daya alam. Hal ini akan menghambat pengorganisasian diri dan kondisi sistem yang seimbang dan mengakibatkan krisis ekologi sosial (Yin, Chen, & Li, 2022, h. 4). Indikator keberhasilan pembangunan desa didasarkan pada penerapan konsep pariwisata di desa, alih-alih mengatasi masalah mendasar dari krisis keberlanjutan untuk pengembangan strategi holistik jangka panjang (Yin, Chen, & Li, 2022, h. 5).

Desa Wanurejo di Kabupaten Magelang telah mengalami transformasi signifikan dari desa agraris menjadi desa wisata. Transformasi ini membawa dampak positif dalam bentuk peningkatan pendapatan dan peluang ekonomi bagi masyarakat

setempat. Di sisi lain, perubahan ini juga menimbulkan krisis ekologi sosial yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Transformasi desa yang menjadi tujuan wisata ini telah membawa dampak signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat setempat terutama para petani. Perubahan ini menciptakan ketegangan antara kebutuhan pelestarian lingkungan dan tekanan ekonomi yang ditimbulkan oleh industri pariwisata.

Transformasi Desa Wanurejo dari desa agraris menjadi desa wisata mencerminkan dinamika yang sering terjadi dalam pengembangan CBT. Transformasi ini biasanya membawa dampak positif seperti peningkatan pendapatan dan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan temuan Mtapuri, Camilleri, dan Dłużewska (2021) bahwa CBT dapat meningkatkan pengembangan ekonomi lokal dengan mengurangi kebocoran ekonomi dari industri pariwisata. Namun, hal tersebut juga dapat menimbulkan krisis ekologi sosial. Menurut Mason (dalam Mtapuri, Camilleri, & Dłużewska, 2021, h. 24), sumber daya alam, buatan manusia, dan budaya yang menjadi andalan pariwisata rentan terhadap konsumsi berlebihan. Hal ini dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan karena pariwisata yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan ketegangan sosial. Oleh karena itu, penting bagi komunitas lokal untuk terlibat dalam keputusan tentang pengembangan pariwisata di destinasi

mereka, serta menjaga sumber daya mereka untuk kepentingan mereka sendiri dan generasi mendatang (Mtapuri, Camilleri, & Dłużewska, 2021, h. 26).

Ketahanan ekologi sosial adalah kapasitas sistem masyarakat desa untuk beradaptasi dengan perubahan yang disebabkan oleh pengembangan pariwisata komersial di desa agraris. Pariwisata sering dikaitkan dengan ketahanan dan dianggap sebagai alat untuk pembangunan ekonomi dan insentif terkait untuk perlindungan lingkungan yang keduanya merupakan aspek penting dari ketahanan ekologi sosial (Weis, Chambers, & Holladay, 2021, h. 459). Pariwisata di daerah perdesaan dan berbasis masyarakat desa berkembang pesat karena daerah perdesaan telah mengalami peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan rekreasi (Ghaderi, Hall, & Ryan 2022, h. 5). Oleh karena itu, Desa Wanurejo menjadi studi kasus yang menarik untuk memahami aspek-aspek yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di masyarakat perdesaan melalui lensa ketahanan ekologi sosial.

Penelitian ini menganalisis persepsi masyarakat terhadap konsep CBT dan ketahanan ekologi sosial di Desa Wanurejo melalui perspektif sistem sosial Niklas Luhmann. Melalui paradigma konstruktivis radikal (Leydesdorff, 2012, h. 85) tujuan studi ini yaitu: 1) mengeksplorasi sistem sosial dalam menciptakan dan mempertahankan batas-batas dan identitas mereka sendiri sehingga dapat mengetahui peluang dan hambatan masyarakat terhadap manfaat pariwisata; 2) memahami proses komunikasi dalam membentuk

realitas sosial dan menciptakan makna; dan 3) mengetahui sistem sosial dalam beradaptasi dan berevolusi dari waktu ke waktu sebagai respons terhadap tekanan internal dan eksternal. Transformasi desa dari pertanian tradisional menjadi desa wisata menghadirkan tantangan unik yang membutuhkan analisis lebih lanjut, terutama dalam konteks ketahanan ekologi di kawasan strategis pariwisata nasional Borobudur. Penelitian ini menyoroti dinamika antara pariwisata, masyarakat, dan lingkungan, serta mengkaji adaptasi sistem sosial terhadap tekanan internal dan eksternal. Studi ini juga mempertimbangkan konflik kepentingan dalam desa wisata dan menawarkan kerangka kerja untuk memahami interaksi ekologi sosial. Struktur penelitian mencakup analisis evolusi ekologi sosial, kebijakan komunikasi pemerintah, serta rekomendasi strategis bagi pengelolaan pariwisata yang lebih berkelanjutan.

Transformasi Desa Wanurejo menjadi destinasi pariwisata telah memicu krisis ekologi sosial yang mencerminkan ketidakseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan lokal. Penelitian ini memanfaatkan paradigma konstruktivis dan teori sistem sosial Luhmann untuk memahami dinamika ini. Ketahanan ekologi sosial menjadi kerangka penting untuk menelaah interaksi antara sistem sosial dan lingkungan alam. Ketahanan, sebagaimana dipahami dari pendekatan sistemik, tidak hanya menekankan kemampuan bertahan terhadap gangguan, tetapi juga kapasitas adaptasi melalui proses komunikasi dan

pembelajaran kolektif (Espeso-Molinero & Pastor-Alfonso, 2020, h. 3). Luhmann menekankan bahwa sistem sosial bersifat *autopoietik*, yakni membentuk dan mempertahankan batas serta identitasnya melalui komunikasi (Tække & Paulsen, 2010, h. 2). Sistem dapat merespons tekanan eksternal dan menavigasi kompleksitas lingkungan melalui proses resonansi sosial. Dalam konteks CBT, pemahaman atas resonansi dan ketahanan sistem menjadi penting untuk melihat tanggapan komunitas lokal pada peluang dan ancaman dari industri pariwisata (Satriya & Indrayani, 2023, h.135).

METODE

Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif melalui metode studi kasus dan analisis data menggunakan pendekatan analisis wacana. Pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama merumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci yang berkaitan dengan sistem sosial dalam menciptakan dan mempertahankan batas-batas dan identitas mereka, serta memahami proses komunikasi dalam membentuk realitas sosial dan menciptakan makna. Kemudian, tahap kedua adalah pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), observasi, serta wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara formal dan terjadwal yang umumnya mengikuti skrip wawancara dan mencakup berbagai topik (Neuman, 2014, h. 432), untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat tentang konsep CBT dan ketahanan ekologi sosial dari teori sistem

sosial di Desa Wanurejo. Hal ini secara khusus akan menjawab pertanyaan tentang sistem sosial dalam menciptakan dan mempertahankan batas-batas dan identitas mereka, memahami proses komunikasi membentuk realitas sosial dan menciptakan makna, serta mengetahui sistem sosial beradaptasi dan berevolusi.

FGD dilakukan secara daring dengan mengundang 12 pelaku utama pengembangan CBT di Borobudur. FGD ini merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui wawancara dan diskusi

kelompok (Neuman, 2014, h. 433). Teknik ini merupakan pengembangan dari teknik *brainstorming* dan diskusi kelompok. FGD lebih mudah membangkitkan partisipasi pelaku pengembangan pariwisata dalam menggali, mengumpulkan informasi permasalahan, keinginan dan kebutuhan yang ada, serta alternatif pemecahan masalah terkait infrastruktur pengembangan pariwisata perdesaan.

Tahap ketiga adalah melakukan wawancara terhadap 17 orang yang terdiri dari kepala desa dan sekretaris Desa Wanurejo, Ketua Kelompok Sadar Wisata

Tabel 1 Model Pertanyaan Semi Terstruktur dari Model Weis, Chambers, dan Holladay (2021)

No	Pertanyaan	Elemen
1	Bagaimana keputusan dibuat di masyarakat? Siapa yang membuat keputusan untuk masyarakat? (keterlibatan masyarakat)	Tata kelola
2	Apakah Anda merasa punya pengaruh atau peran dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan desa wisata? (seberapa besar peran Anda dalam menentukan hal-hal penting di desa wisata?)	Tata kelola
3	Bagaimana Anda menggambarkan komunitas desa Anda? Apa saja batas-batas geografisnya?	Tata kelola
4	Ketika ada konflik di masyarakat, bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah tokoh agama berperan dalam penyelesaian konflik?	Sosial
5	Apa pendapat masyarakat tentang pariwisata atau turis di desa wisata ini? Apa pendapat Anda tentang pariwisata dan wisatawan di sini?	Sosial
6	Jika Anda tidak bekerja di bidang pariwisata, apa yang akan Anda lakukan? Apakah hal tersebut bertentangan dengan agama yang Anda anut?	Sosial
7	Apa perbedaan antara bekerja di bidang pertanian dan pariwisata?	Sosial
8	Menurut Anda, apa yang harus dimiliki masyarakat untuk membantu pengembangan pariwisata berkelanjutan?	Sosial
9	Ceritakan tentang potensi pariwisata saat ini! Bagaimana potensi wisata budayanya? Bagaimana kondisi pendanaannya? Apakah ada ketergantungan pada pendanaan eksternal?	Sosial
10	Apakah Anda tahu visi desa wisata? Apakah anda melihat potensi peningkatan dampak ekologis jika ada peningkatan pariwisata?	Ekologi
11	Apakah Anda melihat aspek negatif dari jenis pariwisata perdesaan ini?	Ekologi
12	Apakah ada perbedaan antara orang yang bekerja di bidang pariwisata dan yang tidak bekerja di bidang pariwisata?	Ekologi
13	Seperti apa kesejahteraan masyarakat desa sekarang ini dengan adanya pariwisata?	Ekonomi
14	Bagaimana konsep CBT dapat membantu masyarakat untuk memperoleh manfaat dari pariwisata? Apakah bisa membuat masyarakat aktif berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata dan dapat memperoleh manfaat dari pariwisata?	Ekonomi
15	Apa pendapat masyarakat tentang pariwisata atau turis di desa wisata ini? Dan apa pendapat Anda tentang pariwisata dan wisatawan di sini?	Ekonomi

Sumber: Olahan Data Peneliti (2024)

(Pokdarwis) Wanurejo, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dan pengelola wisata perdesaan, ketua koperasi, tokoh masyarakat, kelompok tani, pemilik *homestay*, dan pelaku usaha pariwisata di Desa Wanurejo. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi perbedaan yang lebih beragam di antara kategori industri. Wawancara dilakukan rata-rata 60 menit di Balai Ekonomi Desa (Balkondes), balai desa, dan di rumah-rumah penduduk.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, 2014, h. 34) yang mencakup kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan. Data dikumpulkan melalui FGD dan wawancara langsung yang direkam dengan persetujuan

informan, lalu ditranskrip dan dicatat dalam catatan lapangan. Pengodean dilakukan secara induktif dan manual untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait ketahanan dan desa wisata. Tema ditentukan berdasarkan frekuensi kemunculan dalam wawancara dan relevansinya dengan pertanyaan penelitian. Fusch (dalam Weis, Chambers, & Holladay, 2021, h. 467) menyatakan bahwa data dianggap mencapai titik jenuh ketika tidak ada informasi baru yang muncul.

Penelitian ini memastikan validitas data melalui teknik triangulasi metode, yakni dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti FGD, wawancara, dan observasi.

Tabel 2 Daftar Peserta FGD

No	Institusi	Fungsi
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Magelang	Pemangku Kebijakan
2	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbangda) Kabupaten Magelang	Pemangku Kebijakan
3	Universitas Muhammadiyah Cirebon	Akademisi & Praktisi Pariwisata
4	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora Kabupaten Magelang)	Pemangku Kebijakan Pariwisata
5	Wakil Pokdarwis dari Desa Wisata Karangrejo	Pelaku Desa Wisata
6	Wakil Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Magelang	Ekonomi Kreatif dan UMKM
7	Badan Otorita Borubudur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)	Otoritas Pemerintah yang terkait Pengembangan Prioritas Pariwisata
8	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma)	Akademisi
9	PT Manajemen CBT Nusantara	Operator Pariwisata
10	Direktur Destinasi Pariwisata di Magelang	Operator Pariwisata/ (Lembaga Swadaya Masyarakat)
11	Ketua Forum Desa Wisata Kabupaten Magelang & Ketua Himpunan Pramuwisata	LSM
12	PKK Milenial dan Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Desa (ForKom BUMDes)	LSM

Sumber: Olahan Data Peneliti (2024)

Triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi serta memperkuat keabsahan interpretasi data. Pengodean induktif dilakukan dengan pendekatan *bottom-up*, di mana kode dikembangkan langsung dari data tanpa kategori awal yang telah ditetapkan. Pendekatan ini memungkinkan teori dan konsep baru muncul dari data mentah, sejalan dengan perspektif sistem sosial Luhmann (Luhmann, 2015). Metode ini cocok untuk penelitian kualitatif konstruktivis yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru tentang dinamika sosial dalam pengelolaan desa wisata.

HASIL

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap konsep CBT dan ketahanan ekologi sosial dari teori sistem komunikasi pembangunan di Desa Wanurejo. Sistem komunikasi pembangunan akan diukur dan dianalisis dengan menggunakan tiga aspek refleksi sibernetika Luhmann, yaitu aspek komunikasi, evolusi, dan kemampuan

diferensiasi internal, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai persepsi masyarakat lokal dalam memaknai pengembangan desa wisata dan ketahanan ekologi sosial masyarakat dalam berevolusi.

Sistem sosial menetapkan batas-batasnya sendiri dengan memilih elemen-elemen yang relevan dari lingkungan dan mengabaikan elemen-elemen lainnya. Sistem CBT juga mempertahankan identitasnya sendiri melalui komunikasi internal dan pertukaran informasi antarelemen sistem. Berdasarkan analisis kualitatif dari wawancara informan kunci dan diselaraskan dengan sistem fungsi Luhmann, beberapa subsistem dalam sistem CBT Desa Wanurejo telah dikategorikan sehingga bisa mengidentifikasi narasi peluang dan hambatan untuk pariwisata perdesaan (sesuai kategori elemen sistem sosial dalam Tabel 1). Aspek-aspek yang dianggap sebagai peluang atau hambatan yang sering muncul, di antaranya: 1) elemen ekologi seperti citra dan agen perubahan; 2) elemen ekonomi seperti wisata massal, akses yang terbatas dan musiman, 3)

Tabel 3 Penyajian Hasil Temuan Utama

Aspek	Penjelasan
Tujuan Penelitian	Menganalisis persepsi masyarakat terhadap konsep CBT dan ketahanan ekologi sosial melalui perspektif sistem komunikasi pembangunan di Desa Wanurejo.
Pendekatan Analisis	Menggunakan tiga aspek refleksi sibernetik Luhmann: komunikasi, evolusi, dan kemampuan diferensiasi internal untuk memahami persepsi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata dan ketahanan ekologi sosial.
Adaptasi Sistem Sosial	Sistem sosial berevolusi sebagai respons terhadap tekanan internal dan eksternal dengan mengubah struktur internal, memperluas batas, atau mengembangkan subsistem baru (Luhmann, 2015).
Respons CBT Desa Wanurejo	Sistem CBT merespons tekanan dengan menyesuaikan struktur internalnya agar tetap berfungsi dan mempertahankan identitasnya meskipun terjadi perubahan lingkungan.
Hasil Pengodean Induktif	Dari proses koding ditemukan empat elemen utama dalam sistem CBT: sosial, ekologi, ekonomi, dan tata kelola.

Sumber: Olahan Data Peneliti (2024)

elemen sosial seperti narasi legalitas, keagamaan, dan transformasi budaya; dan 4) elemen tata kelola yaitu kelembangaan dan intervensi pemerintahan (Tabel 4).

Subsistem Ekologi dalam Sistem Desa Wisata Wanurejo

Candi Borobudur dan Candi Pawon menjadi daya tarik utama Desa Wisata

Wanurejo yang didukung oleh keindahan alam, nilai sejarah, dan peradaban yang menarik minat wisatawan. Reputasi Candi Pawon makin memperkuat daya tarik kawasan ini, mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, dan membuka peluang pengembangan desa wisata yang lebih terorganisir. Selain itu, pengembangan

Tabel 4 Hasil Jawaban dari FGD dan Wawancara yang Dicatat Sebagai Narasi, Kode, dan Elemen Sistem

No	Narasi	Respons	Elemen
1	Candi Borobudur dan Candi Pawon beserta aktivitas kegiatannya sebagai daya tarik utama.	Pengembangan reputasi (citra)	Ekologi
2	Keselarasn antara keindahan alam perdesaan dan pengalaman wisatawan. Pembukaan lahan-lahan di perdesaan untuk pengembangan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) dan daya tarik wisata baru yang bersifat buatan.	Literasi ekowisata	Ekologi
3	Paguyuban Karya Muda (pemuda desa) inisiator untuk melahirkan adanya kesadaran wisata.	<i>Agent of change</i>	Ekologi
4	Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak terintegrasi.	PT. CBT Nusantara ditunjuk menjadi pendamping (peningkatan kualitas SDM) Balkondes	
5	Mengejar pendapatan maksimum yang paling mudah diakses melalui peluang jangka pendek yang beragam.	Membuat program-program wisata massal	Ekonomi
6	Aktivitas desa wisata cenderung mencari sesuatu yang memiliki visual yang menarik untuk diabadikan dalam foto, munculnya daya tarik wisata buatan yang menyesuaikan selera pasar.		
7	<i>Event-event</i> budaya cenderung bertujuan untuk mencari keuntungan.		
8	Kegiatan <i>ngasong</i> atau berjualan cendera mata menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata.	Keterbatasan akses masyarakat lokal untuk berpartisipasi	Ekonomi
9	Berpartisipasi menjadi buruh pariwisata, misalnya sebagai tukang parkir dan tukang semir sepatu.		
10	Masyarakat banyak yang tidak berpartisipasi dalam pemanfaatan pariwisata. Intimidasi pemerintah dan pengusuran kawasan pemukiman.		
11	Fluktuasi kunjungan wisatawan tidak menjadikan wisata sebagai penghasilan utama masyarakat lokal.	Wisata musiman	Ekonomi
12	<i>Booming</i> usaha <i>homestay</i> tanpa pengetahuan <i>hospitality</i> yang memadai ketergantungan pada <i>event</i> wisata.		
13	Tumpang tindih kebijakan.	Legalitas	Sosial
14	Masifnya pembangunan (tak terkendali) di kawasan Borobudur baik melalui bertambahnya fasilitas penunjang pariwisata berupa jalan aspal, hotel, vila, restoran, dan <i>homestay</i> .		
15	Standarisasi dan perizinan.		
16	Mayoritas masyarakat asli Magelang adalah pemeluk agama Islam kejawen sehingga banyak warga desa percaya bahwa kegiatan seperti wayangan berfungsi semacam penjamin keselamatan desa.	Keagamaan (Islam kejawen)	Sosial
17	Aspek agama Budha telah mengonstruksi gagasan dan perilaku ritual keagamaan masyarakat.		

18	Organisasi keagamaan tidak aktif sehingga ritual keagamaan tidak bersifat alamiah dan dipaksakan.	Transformasi budaya	Sosial
19	Tradisi dan seni budaya merupakan konsep umum yang menjadi dasar pengembangan pariwisata di Desa Wanurejo, dalam hal ini sebagai desa wisata budaya dan kriya.		
20	Rasa memiliki kegiatan budaya yang mulai menurun. Saat ini warga desa sudah mulai menekankan pada jumlah dana yang disediakan oleh pihak panitia, berbeda dengan dulu, masih terlihat kerja sama dan budaya urunan.		
21	Kegiatan saparan dan RRB (Ruwat Rawat Borobudur) yang merupakan kegiatan doa bersama (pengajian), arak-arakan tumpeng, wayangan dan kegiatan rakyat yang akrab dan khidmat menjadi kaku dan formal.		
22	Generasi muda dan budaya lokal.		
23	Keterlibatan komunitas (pemuda).		
24	Pokdarwis inisiatif mengadakan paket wisata berbasis aktivitas sehari-hari, yaitu wisata <i>ani-ani</i> dan pembuatan lotek.	Kelembagaan	Tata kelola
25	Terbentuknya Tim Anti Kejahatan dan Kekerasan (TANKER) untuk membuat kenyamanan dalam berwisata.		
26	Pengembangan atraksi wisata berbasis budaya		
27	Beragamnya pengelola daya tarik wisata di desa wisata: Paguyuban Karya Muda, Bapardes (Badan Pariwisata Desa), Koperasi Pariwisata Daerah (Koparda), BUMDes.		
28	Pengelolaan Pariwisata oleh Bapardes (lebih berfungsi mengelola peluang ekonomi dari produksi kerajinan)	Intervensi pemerintah	Tata kelola
29	Munculnya intervensi eksternal dalam pengembangan pariwisata dengan adanya kebijakan dan bantuan dari pemerintah.		
30	Balkondes kurang optimal		

Sumber: Olahan Data Peneliti (2024)

daya tarik wisata buatan seperti Balkondes, *Junkyard Auto Park* (taman buatan berisi mobil rongsokan), dan berbagai festival turut menjadi magnet baru yang meningkatkan jumlah wisatawan, terutama sejak 2018. Maraknya pembukaan lahan untuk wisata buatan juga menimbulkan tantangan terkait keberlanjutan lingkungan dan rendahnya literasi ekowisata masyarakat sehingga diperlukan peningkatan pemahaman ekowisata untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan kelestarian lingkungan.

Pengelolaan pariwisata di Wanurejo berkembang dengan inisiatif pemuda desa yang membentuk berbagai organisasi seperti Paguyuban Karya Muda, Koparda, dan

BUMDes sebagai upaya mengembangkan desa wisata secara mandiri. Balkondes berperan sebagai pusat kegiatan wisata dan diharapkan mendorong perekonomian masyarakat, meskipun implementasinya menghadapi tantangan, seperti pelatihan SDM yang belum terintegrasi dan konflik akibat tumpang tindih kewenangan dengan PT Manajemen CBT Nusantara. Proses perencanaan Balkondes melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk PT Taman Wisata Candi dan kluster pariwisata Borobudur. Namun, alokasi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Bank Nasional Indonesia (BNI) lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan pemugaran Candi Pawon,

sementara pengembangan SDM masih kurang diperhatikan sehingga berpotensi menghambat optimalisasi manfaat pariwisata bagi masyarakat setempat.

Subsistem Ekonomi dalam Sistem Desa Wisata Wanurejo

Selama FGD dan wawancara, terungkap bahwa masyarakat lokal lebih fokus mengejar pendapatan maksimum melalui peluang jangka pendek dibanding mengembangkan bisnis jangka panjang. Wisata massal lebih diutamakan untuk mendapatkan keuntungan cepat daripada membangun profesi yang stabil. Pola pikir ini dianggap sebagai warisan budaya agraris dan kolonial yang masih melekat. Selain itu, muncul fenomena wisata berbasis visual yang menarik (*instagramable*) serta daya tarik wisata buatan yang menyesuaikan selera pasar. *Event* budaya pun lebih berorientasi pada keuntungan. Ketergantungan masyarakat pada investasi eksternal memperparah kondisi karena banyak yang hanya menunggu investor mengembangkan wisata, alih-alih mengambil inisiatif sendiri. Ketidakseimbangan distribusi manfaat pariwisata pun terjadi dengan beberapa komunitas lebih diuntungkan dibanding lainnya. Banyak warga hanya menjadi pekerja sektor pariwisata, seperti tukang parkir atau tukang semir sepatu, sementara munculnya alternatif wisata baru di Borobudur juga memicu konflik sosial, termasuk intimidasi pemerintah dan pengusuran pemukiman.

Desa Wanurejo telah menerapkan prinsip pariwisata berbasis komunitas

dengan keterlibatan masyarakat melalui Bapardes dalam pengelolaan sumber daya lokal. Namun, partisipasi ini masih terbatas dan manfaat ekonomi tidak merata. Infrastruktur dan layanan wisata terus dikembangkan untuk meningkatkan pengalaman pengunjung, tetapi kesejahteraan penduduk lokal belum menjadi prioritas. Fluktuasi jumlah wisatawan juga membuat ketergantungan pada pariwisata menjadi risiko bagi perekonomian masyarakat. Contohnya, industri *homestay* yang berkembang pesat tanpa didukung pelatihan *hospitality* memadai menyebabkan potensi eksploitasi masyarakat lokal.

Selain itu, banyak usaha pariwisata, seperti restoran di tengah sawah dan *event-event* wisata yang hanya ramai saat musim liburan membuat pendapatan masyarakat tidak stabil. Ketergantungan terhadap pariwisata musiman mendorong masyarakat mencari sumber pendapatan alternatif, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengurangi risiko ketidakpastian ekonomi akibat faktor eksternal seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau pandemi.

Subsistem Sosial dalam Sistem Desa Wisata Wanurejo

Kepastian hukum pariwisata di Desa Wanurejo masih belum tertata dengan baik, ditandai dengan tidak adanya regulasi khusus yang mendorong praktik berkelanjutan serta tumpang tindih kebijakan. Salah satu isu yang muncul dalam wawancara adalah perlunya sertifikasi dan izin bagi penyelenggaraan

homestay sebagai bagian dari sistem formal dalam mengatur akomodasi desa wisata. Pembangunan yang masif dan tak terkendali di sekitar Borobudur memperburuk situasi dengan dominasi investor eksternal yang memiliki akses permodalan kuat. Pemerintah lebih berfokus pada pengembangan infrastruktur dan layanan wisata guna meningkatkan pengalaman pengunjung tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal. Kebijakan yang masih melihat pariwisata sebagai alat pembangunan ekonomi ini berisiko mengabaikan praktik tradisional dan hukum adat yang dapat berkontribusi pada keberlanjutan sosial dan ekosistem. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mengintegrasikan praktik tradisional dalam industri pariwisata agar tetap menghormati warisan budaya dan memperkuat keberlanjutan desa wisata.

Pariwisata di Desa Wanurejo dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus melestarikan budaya dengan berbagai upaya mempertahankan seni dan tradisi lokal sebagai daya tarik wisata. Setiap dusun memiliki kelompok kesenian yang aktif dalam acara budaya seperti Gelar Budaya Wanurejo, di mana wisatawan dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seni dan ekonomi lokal. Namun, semangat kebersamaan dalam pelestarian budaya yang mulai menurun dengan pergeseran fokus ke aspek finansial menyebabkan acara budaya menjadi lebih formal dan kehilangan nuansa tradisionalnya.

Perubahan gaya hidup akibat interaksi dengan wisatawan serta pengaruh ekonomi pariwisata turut berdampak pada pola pikir generasi muda yang cenderung lebih terbuka terhadap budaya global dibanding mempertahankan warisan lokal. Selain itu, ada risiko komodifikasi budaya, di mana nilai-nilai asli seni dan tradisi diubah demi memenuhi selera wisatawan. Meskipun demikian, masyarakat Wanurejo tetap mempertahankan kepercayaan dan praktik budaya mereka, seperti tradisi *Kejawen* yang berpadu dengan ajaran Islam, serta ritual lokal yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur dan lingkungan. Praktik ini menunjukkan bahwa di tengah arus modernisasi, Desa Wanurejo tetap berusaha menjaga identitas dan nilai-nilai kulturalnya dalam menghadapi perkembangan pariwisata.

Subsistem Tata Kelola dalam Sistem Desa Wisata Wanurejo

Intervensi eksternal dalam pengembangan pariwisata di Desa Wanurejo tampak melalui kebijakan pemerintah seperti program *Tilik Ndeso* yang menawarkan wisata singkat tanpa interaksi mendalam dengan masyarakat lokal. Pengembangan desa wisata seharusnya tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pokdarwis berupaya menjadikan pariwisata sebagai sarana pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan warga. Namun, tantangan muncul dalam menjaga keaslian budaya di tengah tren wisata yang

mengutamakan daya tarik visual, seperti *Junkyard Auto Park*. Selain itu, tata kelola pariwisata di Desa Wanurejo menghadapi kendala koordinasi berbagai organisasi pengelola wisata, seperti Paguyuban Karya Muda, Bapardes, Koparda, BUMDes, dan Balkondes. Keterlibatan Balkondes lebih banyak berorientasi pada penyewaan pendapa dan *homestay* tanpa partisipasi aktif masyarakat. Hal ini menambah tantangan dalam menciptakan struktur pengelolaan wisata yang efektif. Kehadiran TANKER untuk menjaga keamanan wisatawan juga menambah kompleksitas koordinasi di sektor ini.

Permasalahan manajerial dalam pengelolaan akomodasi turut menjadi kendala dalam optimalisasi pendapatan pariwisata. Pengembangan *homestay* masih memerlukan pembinaan dan manajemen yang lebih baik, sementara Bapardes, yang bertanggung jawab atas *homestay*, justru lebih berfokus pada sektor kerajinan. Tata kelola dana dari CSR dan sumber lainnya juga menjadi isu penting dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas. Dana CSR dari BNI telah digunakan untuk pengembangan UMKM, pembangunan *homestay*, dan pemugaran Candi Pawon, sementara infrastruktur seperti Balkondes dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu *Reduce-Reuse-Recycle* (TPST3R) dibangun untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan. Kolaborasi antarmasyarakat dan pihak swasta, seperti dengan PT Taman Wisata Candi, berperan penting dalam pengembangan dan promosi pariwisata desa. Pengelolaan yang lebih

baik memungkinkan pariwisata di Desa Wanurejo berkembang secara berkelanjutan tanpa mengorbankan keaslian budaya dan kesejahteraan masyarakat setempat.

PEMBAHASAN

Sistem sosial terbentuk melalui komunikasi internal yang menciptakan dan mempertahankan batas serta identitasnya (Satriya & Indrayani, 2023, h. 142). Komunikasi ini bergantung pada kode dan simbol bersama yang memungkinkan individu dalam sistem berkoordinasi dan memahami lingkungan mereka (Lee, 2000, h. 359). Melalui proses yang dinamis dan berkelanjutan, individu menegosiasikan makna serta membentuk pemahaman mereka tentang dunia dan peran mereka di dalamnya. Pemahaman terhadap proses komunikasi dan kode dalam sistem sosial membantu mengungkap perspektif mereka tentang isu-isu sosial dan ekologi, serta membuka peluang kolaborasi dan penyelesaian konflik (Satriya, Indrayani, Roosdhani, & Arifin, 2022, h. 3). Eksplorasi sepuluh narasi kunci dari keempat elemen sistem CBT menjadi data dasar dalam memahami peluang dan kendala bagi masyarakat dalam pengembangan pariwisata saat ini dan di masa depan. Pemahaman ini penting untuk meningkatkan ketangguhan CBT di Desa Wanurejo. Pada bagian ini, kami membahas narasi-narasi CBT dalam keterkaitannya satu sama lain serta dengan teori ketahanan ekologi sosial.

Narasi pertama dalam elemen ekologi adalah pengembangan reputasi, di mana

popularitas Candi Borobudur menjadi landasan kampanye pemasaran pariwisata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meningkatkan reputasi desa wisata sebagai tujuan wisata dipandang sebagai peluang untuk mengembangkan pariwisata dan bukan sebagai ancaman.

Popularitas Candi Borobudur dianggap berkontribusi pada reputasi positif yang berkelanjutan melalui promosi dari mulut ke mulut, tetapi citra keseluruhan Candi Borobudur akan memberikan persepsi positif jika konsisten dengan pengalaman yang dimiliki pengunjung (Informan 9, PT Manajemen CBT Nusantara, FGD, April 2023).

Sejalan dengan tren modern, wisatawan kini memanfaatkan platform daring untuk berbagi pengalaman perjalanan mereka yang berdampak pada ketahanan ekonomi pariwisata. Menurut Tyrrell (dalam Weis, Chambers, & Holladay, 2021, h. 470), persepsi wisatawan baik positif maupun negatif, berpengaruh pada naik turunnya aktivitas pariwisata di suatu destinasi. Destinasi berbasis komunitas seperti Desa Wanurejo cenderung lebih rentan dibanding destinasi besar karena ketergantungan ekonomi yang tinggi dan paparan terhadap bencana alam (Satriya, Wahyuni, & Sulastri, 2023, h. 36). Namun, destinasi yang mampu mempertahankan identitas uniknya di tengah globalisasi, seperti Desa Hekeng di China, dapat meningkatkan ketahanan ekonominya melalui pelestarian sejarah dan budaya lokal (Zhu, Yuan, Liu, Guan, Sun & Chen, 2021, h.482).

Selanjutnya narasi kedua, yaitu

agent of change, menekankan pentingnya pengembangan pelaku pariwisata perdesaan di Desa Wanurejo dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan budaya, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi, melestarikan budaya, dan menjaga kelestarian lingkungan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dan pemimpin lokal dalam memastikan keberlanjutan pariwisata (Ikhtiangung & Radyanto, 2020, h. 9; Maldonado-Erazo del Río-Rama, Noboa-Viñan, & Álvarez-García, 2020, h. 4). Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan (Cole & Browne, 2015, h. 446).

Narasi ketiga, wisata massal, menyoroti fokus pada pendapatan jangka pendek dibandingkan proyek bisnis jangka panjang. Pola pikir ini sering dikaitkan dengan warisan budaya agraris dan kolonial yang dapat menghambat inisiatif masyarakat dalam mengakses manfaat pariwisata secara berkelanjutan. Ketergantungan pada hibah mencerminkan sikap pasif. Namun, di sisi lain, fleksibilitas dalam memanfaatkan peluang pendapatan yang berfluktuasi juga menjadi strategi adaptasi terhadap pola musiman. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa hibah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan justru dapat mengurangi insentif kewirausahaan, seperti yang terjadi pada petani di Desa Hekeng (Zhu, Yuan,

Yuan, Liu, Guan, Sun & Chen, 2021, h. 474). Sebaliknya, tingkat pendanaan hibah yang rendah dapat mendorong kemandirian masyarakat.

Pola pikir keramaian ini tampaknya mencerminkan tujuan yang lebih luas dari diversifikasi ekonomi dan dari hasil wawancara terlihat jelas bahwa ada gesekan antara stabilitas (fokus jangka panjang) dan fleksibilitas (pola pikir keramaian jangka pendek). Keragaman ekonomi telah lama diakui dapat mengurangi kerentanan terhadap tren pariwisata yang tidak dapat diprediksi, termasuk di desa-desa CBT. Studi ini menyoroti perlunya mengalihkan fokus dari keuntungan jangka pendek ke keuntungan jangka panjang, seperti membangun profesi dengan pendapatan yang lebih konsisten. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat lokal dalam jangka panjang (Van Assche, Birchall, & Gruezmacher, 2022, h. 7).

Berkaitan dengan sistem fungsi ekonomi, narasi keempat menyoroti keterbatasan akses masyarakat Desa Wanurejo terhadap manfaat pariwisata, baik secara langsung melalui pekerjaan seperti pemandu wisata, pedagang, atau pemilik *homestay*, maupun secara tidak langsung melalui sektor lain seperti pertanian. Kemampuan mereka memperoleh penghasilan dari berbagai sumber dianggap sebagai strategi untuk menghadapi ketidakstabilan ekonomi dan menjadikan pariwisata sebagai sektor yang

mendiversifikasi pendapatan. Namun, ketika pengembangan pariwisata terlalu berorientasi pada ekonomi, maka aspek sosial, ekologi, dan tata kelola dapat terabaikan, serta berisiko mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Keberagaman sumber pendapatan menjadi indikator ketahanan ekonomi industri pariwisata lokal dengan akses yang lebih adil terhadap pendapatan yang berkelanjutan.

Narasi kelima dalam elemen ekonomi menyoroti tantangan musiman dalam pariwisata, di mana musim liburan yang singkat membatasi akses masyarakat terhadap pendapatan. Keinginan untuk memperpanjang musim pariwisata muncul agar lebih banyak peluang ekonomi tersedia, sekaligus mengurangi dampak fluktuasi musiman. Diversifikasi ekonomi dan penciptaan sumber pendapatan alternatif diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pariwisata serta kesejahteraan masyarakat lokal. Memperpanjang musim pariwisata juga diketahui dapat meningkatkan ketahanan destinasi dan mengurangi kerentanannya terhadap perubahan ekonomi.

Narasi keenam dalam elemen sosial menyoroti tantangan legalitas dalam pariwisata berkelanjutan. Tidak adanya peraturan, insentif, serta sistem sertifikasi bagi operator pariwisata dan *homestay* menyulitkan penerapan praktik ramah lingkungan serta standar kualitas yang jelas. Hal ini dapat berdampak negatif pada lingkungan, budaya, dan keberlanjutan industri pariwisata jangka

panjang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong praktik pariwisata berkelanjutan serta sistem akreditasi bagi operator *homestay* untuk memastikan standar keselamatan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan. Selain itu, kurangnya pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum formal di Desa Wanurejo menjadi tantangan dalam pelestarian warisan budaya lokal. Pengakuan terhadap hukum adat dapat berkontribusi pada keberlanjutan serta ketahanan masyarakat dan ekosistem.

Narasi ketujuh dalam elemen sosial membahas transformasi budaya akibat pemusatan pariwisata seperti proyek *Borobudur Highland* yang berisiko menggeser masyarakat lokal dan menghilangkan praktik tradisional. Pembangunan infrastruktur berskala besar sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak budaya dan lingkungan yang dapat memperburuk kesenjangan sosial dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan serta mempertimbangkan aspek budaya dan lingkungan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Promosi warisan budaya melalui kerajinan tangan, pertunjukan seni, serta strategi pemasaran yang menyoroti identitas budaya lokal, seperti *saparan mertu* desa atau sedekah bumi, dapat menarik wisatawan yang ingin merasakan kehidupan masyarakat setempat. Studi ini menegaskan pentingnya

pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang melestarikan warisan budaya, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi komunitas.

Narasi kedelapan dalam elemen sosial membahas Islam kejawen sebagai bagian dari warisan budaya Desa Wanurejo, di mana praktik tradisional seperti sadranan, kenduren, selapanan, dan saparan mencerminkan hubungan erat antara agama, budaya, dan penghormatan terhadap leluhur. Kepercayaan ini memengaruhi cara masyarakat mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Meskipun mayoritas penduduk memeluk Islam, pengaruh kejawen masih terlihat dalam seni dan budaya lokal. Oleh karena itu, pelestarian dan promosi tradisi ini penting untuk mempertahankan identitas budaya di tengah modernisasi. Pariwisata berbasis budaya dapat menjadi alat untuk menjaga warisan budaya sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Narasi kesembilan (dari tata kelola) adalah intervensi pemerintah. Peluncuran program *Balkondes* yang kurang optimal, juga diadakannya program *Tilik Ndeso* dari pemerintah cenderung menawarkan kegiatan wisata desa singkat yang berfokus untuk memberikan pengalaman autentik dan berkesan kepada wisatawan dalam waktu singkat. Padahal, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program pengembangan pariwisata desa dapat mengarah pada pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Memasukkan

pendapat masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata merupakan elemen penting dalam pariwisata berkelanjutan. Oleh karena itu, banyak peneliti memperkenalkan pariwisata berbasis masyarakat untuk memberikan kualitas hidup yang tinggi kepada masyarakat lokal dan mendorong nilai-nilai budaya tradisional yang lebih besar. Pendekatan ini memberdayakan masyarakat lokal, mendorong partisipasi mereka dalam pengembangan pariwisata, dan memastikan bahwa manfaat pariwisata didistribusikan secara adil.

Narasi yang kesepuluh (dari elemen tata kelola) adalah kelembagaan. Kegiatan wisata di Wanurejo mulai dibangun sejak tahun 1999 dengan munculnya organisasi seperti Paguyuban Karya Muda, Bapardes pada tahun 2003, Koparda pada tahun 2013, dan BUMDes. Budaya lokal di Desa Wanurejo terus dikembangkan melalui pelatihan tari gratis untuk masyarakat sekitar, dan sebagai sarana edukasi wisata untuk wisatawan. Keberadaan Omah Sanggar Warisan Budaya Nusantara (OSWBN) di Dusun Jowahan juga berperan dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di bidang seni budaya lokal, pendidikan, sosial, dan lingkungan. Ini menunjukkan adanya diferensiasi fungsional di mana masyarakat mulai memiliki peran khusus dalam melestarikan dan mengembangkan budaya lokal.

Pengembangan pariwisata perdesaan juga membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan. Pelatihan SDM dan literasi ekowisata merupakan faktor kunci untuk

mencapai keberlanjutan dalam pariwisata perdesaan. Dalam konteks Desa Wanurejo, industri pertanian, peternakan, dan pariwisata harus saling terkait. Integrasi antarsektor tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menciptakan dampak ekonomi yang positif. Pembukaan tempat wisata baru di daerah perdesaan dapat meningkatkan jumlah pengunjung ke desa tersebut. Namun, hal ini juga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan desa. Intervensi dari pihak luar juga dapat memengaruhi pengambilan keputusan dalam pengembangan pariwisata desa.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap CBT mencerminkan dinamika sosial-budaya yang memperkuat ketahanan ekologi sosial desa. Ketahanan ini ditunjang oleh partisipasi aktif, peran agen perubahan, dan akses ekonomi yang adil. Pengelolaan citra Candi Borobudur dan kesadaran kolektif juga berperan penting dalam menjaga stabilitas ekologi dan ekonomi. Selain itu, adaptasi masyarakat terhadap musim pariwisata melalui diversifikasi ekonomi meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan desa wisata. Kombinasi faktor-faktor ini mendukung pengembangan CBT yang berkelanjutan di Desa Wanurejo.

Saran

Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi dampak teknologi digital terhadap interaksi sosial dalam desa wisata serta efektivitas kebijakan pariwisata

perdesaan. Studi ini dapat membantu memahami kebijakan dan akses terhadap manfaat pariwisata dapat diperbaiki untuk mendukung ketahanan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Cole, S & Browne, M. (2015). Tourism and water inequity in Bali: A social-ecological systems analysis. *Human Ecology*, 43(3), 439–450.
- Djarmiko, A., Syarifuddin, D., Raharja, A. B., & Fitriani, S. A. (2021). Assessment of local communities capacities on developing ethnographic tourism of Kampung Naga, West Java, Indonesia. IOP Conference Series: *Earth and Environmental Science*, 737(1), 1-8.
- Dolezal, C., & Novelli, M. (2020). Power in community-based tourism: Empowerment and partnership in Bali. *Journal of Sustainable Tourism*, 0(0), 1–19.
- Espeso-Moliner, P., & Pastor-Alfonso, M. J. (2020). Governance, community resilience, and indigenous tourism in Nahá, Mexico. *Sustainability*, 12(15), 1-20.
- Ghaderi, Z., Hall, M. M. C., & Ryan, C. (2022). Overtourism, residents and Iranian rural villages: Voices from a developing country. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 37(15), 1-12.
- Ikhtiangung, G. N., & Radyanto, M. R. (2020). New model for development of tourism based on sustainable development. IOP Conference Series: *Earth and Environmental Science*, 448(1).
- Kunjuraman, V. (2020). Community-based ecotourism managing to fuel community empowerment? An evidence from Malaysian Borneo. *Tourism Recreation Research*, 0(0), 1–16.
- Lee, D. (2000). The society of society: The grand finale of Niklas Luhmann. *Sociological Theory*, 18(2), 320–330.
- Leydesdorff, L. (2012). Radical constructivism and radical constructedness: Luhmann's sociology of semantics, organizations, and self-organization. In Alexander Riegler & Armin Scholl, *Constructivist Foundations*, 8(1), 85-92.
- Luhmann, N. (2015). *Theory of society*, Vol 2. US, USA: Stanford University Press.
- Maldonado-Erazo, C. P., del Río-Rama, M. D. L. C., Noboa-Viñan, P., & Álvarez-García, J. (2020). Community-based tourism in Ecuador: Community ventures of the provincial and cantonal networks. *Sustainability*, 12(15), 1–31.
- Manyara, G., & Jones, E. (2007). Community-based tourism enterprises development in Kenya: An exploration of their potential as avenues of poverty reduction. *Journal of Sustainable Tourism*, 15(6), 628–644.
- Miles, M. B, Huberman, A. M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis : A methods sourcebook (3rd Edition)*. London, UK: Sage Publications.
- Musavengane, R & Kloppers, R, (2020). Social capital: An investment towards community resilience in the collaborative natural resources management of community-based tourism schemes. *Tourism Management Perspectives*, 34, 1-15.
- Mtapuri, O., Camilleri, M. A. & Dłużewska, A. (2021). Advancing community-based tourism approaches for the sustainable development of destinations. *Sustainable Development*, 1-24
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches, Seventh Edition*. London, UK: Pearson Education Limited.
- Satarat, N. (2010). Sustainable management of community-based tourism in Thailand. Disertasi. National Institute of Development Administration, Thailand.
- Satriya, Wahyuni, & Sulastri (2023). Socio-ecological resilience and social system in Candirejo village, Magelang: A case study on sustainable tourism development. *Journal of Resilient Economies*, 3(2), 24-43
- Satriya, C. Y., & Indrayani, H. (2023). Kontestasi narasi cbt yang berkelanjutan pada

- kompleksitas ekosistem desa wisata. *Kinesik*, 10(1), 132–154.
- Satriya, C. Y., Indrayani, H., Roosdhani, M. R., & Arifin, S. (2022). Development of communication system for creative industries in Jepara. Proceedings of International Conference on Communication Science (ICCS) University of Mataram, 2(1), 1–10.
- Stone, M. T., & Stone, L. S. (2020). Challenges of community-based tourism in Botswana: A review of literature. *Transactions of the Royal Society of South Africa*, 75(2), 181–193.
- Sunuantari, M. (2017). Tourism communication in community based tourism in Dieng community, Central Java, Indonesia. *Binus Business Review*, 8(2), 149-156.
- Tække, J., & Paulsen, M. (2010). Luhmann and the media. *MedieKultur: Journal of media and communication research*, 26(49), 1-10.
- Van Assche, K., Birchall, J., & Gruezmacher, M. (2022). Arctic and northern community governance: The need for local planning and design as resilience strategy. *Land Use Policy*, 117(4)
- Weis, K., Chambers, C., & Holladay, P. J. (2021). Social-ecological resilience and community-based tourism in the commonwealth of Dominica. *Tourism Geographies*, 23(3), 458–478.
- Yin, X., Chen, J., & Li, J. (2022). Rural innovation system: Revitalize the countryside for a sustainable development. *Journal of Rural Studies*, 93, 1–8.
- Zhu, J., Yuan, X., Yuan, X., Liu, S., Guan, B., Sun, J., & Chen, H. (2021). Evaluating the sustainability of rural complex ecosystems during the development of traditional farming villages into tourism destinations: A diachronic emergy approach. *Journal of Rural Studies*, 86,473–484.